

**EVALUATION OF RICE FOR POOR SOCIETY PROGRAM
IN WONOKUSUMO VILLAGE SEMAMPIR SUBDISTRICT
SURABAYA CITY**

Rizka Nur Alfianti

Dosen Pembimbing: Tauran, S.Sos.,M.Soc,Sc

ABSTRACT

Rice for poor society program is part of the poverty prevention program to meet the needs of a family-based staple food for the poor society. Wonokusumo is one of village that implementing it by the number of poor households of 3,209 heads of household. The purpose of evaluation it to assess how far the program has achieved its goal successfully and targets of government programs. Its goal is to reduce the target household's expanding burden by fulfillment its staple food in rice. The aim this paper is to evaluate rice for poor society program in Wonokusumo Village Semampir Subdistrict Surabaya City by six indicators (six right) include Target, Right Quantity, Right Price, Right Time, Right Administration and Right Quality.

The method is descriptive research with quantitative approach. Research location is in Wonokusumo Village Semampir Subdistrict Surabaya City. Data collection techniques have conducted by distributing questionnaires, interview and observation. Sampling technique use incidental sampling with Slovin formula. The research indicators are Target, Right Quantity, Right Price, Right Time, Right Administration and right Quality. Data analyze was descriptive quantitatively by percentage and qualitative data analyze of interview.

The result shows that rice for poor society program in Wonokusumo Village Semampir Subdistrict Surabaya City does not has six right indicators. There are unexact poor households target. The quantity that received by poor household is not 15 kilograms but 3 kilograms until 7,5 kilograms. The price is not 1.600 IDR per kilogram but 2.000 IDR per kilogram. Based on time, it is not distributed twelve times in a year. Taking rice not use the rice for poor society but by coupons created by local RT or RW. The rice quality is improper to consumed. Suggestion of this study that the government is more disciplined to this program to predefined rules.

Keywords: Evalution, Rice for Poor Society Program, Poor Household

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah penduduk terbesar di dunia setelah Cina, India dan Amerika Serikat. Penduduk Indonesia sebesar 257.516.167 jiwa pada tahun 2012. Salah satu permasalahan yang dihadapi negara Indonesia hingga saat ini yaitu masalah kemiskinan. Sedangkan tahun 2012 jumlah masyarakat miskin di Indonesia yaitu sebesar 28.059.000 jiwa (www.statistikindonesia.com).

Berbagai literatur menunjukkan kemiskinan disebabkan oleh banyak faktor. Menurut Depsos dalam Suharto (2010:134) miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pokok yang layak bagi kemanusiaan atau orang yang mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak memenuhi kebutuhan pokok yang layak bagi kemanusiaan.

Kemiskinan merupakan sebuah kondisi yang berada di bawah garis nilai standar kebutuhan minimum, baik untuk makanan dan non makanan, yang disebut garis kemiskinan atau batas kemiskinan. Garis kemiskinan adalah sejumlah rupiah yang diperlukan oleh setiap individu untuk dapat membayar kebutuhan makanan setara 2100 kilo kalori per orang per hari dan kebutuhan non-makanan yang terdiri dari perumahan, pakaian, kesehatan, pendidikan, transportasi, serta aneka barang dan jasa lainnya (BPS dan Depsos dalam Suharto, 2010 :134).

Sementara itu jumlah penduduk miskin di Jawa Timur tahun 2012 menunjukkan angka 4.961.000 jiwa dari total penduduk 37.687.622 jiwa (BPS Jatim). Jika kondisi ini tidak disikapi

serius, hal ini menunjukkan bahwa ada 4.961.000 atau 13 % orang yang mempunyai potensi menjadi gelandangan dan pengemis. Sedangkan untuk jumlah penduduk miskin di Kota Surabaya sebesar 110.117 jiwa atau 3% masyarakat miskin yang terdapat di Kota Surabaya (<http://www.surabaya.go.id>).

Strategi yang dilakukan pemerintah untuk menaggulangi kemiskinan di Indonesia dengan membuat suatu kebijakan yang dapat membantu masyarakat miskin menjamin dalam kelangsungan hidupnya. Salah satu program pemerintah dalam upaya pengentasan kemiskinan yaitu dikeluarkannya program Raskin. Salah satu dasar hukum yang menjadi landasan pelaksanaan program Raskin yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002, tentang Ketahanan Pangan.

Raskin adalah bagian dari program penanggulangan kemiskinan yang berada pada kluster 1, yaitu kegiatan perlindungan sosial berbasis keluarga dalam pemenuhan kebutuhan pangan pokok bagi masyarakat kurang mampu (Pedum Raskin 2012). Program Raskin dimulai sejak tahun 1998 dengan nama OPK (Operasi Pasar Khusus) beras dan pada tahun 2002 diubah menjadi program beras untuk keluarga miskin (Raskin). Perubahan nama OPK menjadi Raskin dengan maksud untuk mempertajam sasaran program.

Dalam pembagian beras miskin (Raskin), Rumah Tangga Sasaran (RTS) berhak menerima Raskin sebanyak 15kg/bulan dengan harga tebus sebesar Rp. 1.600/kg, sehingga tiap bulannya Rumah Tangga Sasaran (RTS) menebus Raskin dengan harga Rp.

24.000/15kg dan jika dihitung pertahunnya tiap Rumah Tangga Sasaran mendapatkan 180 kg/tahun (Pedoman Raskin 2012). Program Raskin dilaksanakan di seluruh wilayah Indonesia tanpa harus membedakan suatu kondisi di setiap wilayah, karena disemua wilayah di Indonesia dari tingkat propinsi sampai kelurahan/desa terdapat Rumah Tangga Sasaran (RTS).

Program Raskin juga dilaksanakan di Kelurahan Wonokusumo Kecamatan Semampir Surabaya. Kelurahan Wonokusumo merupakan kelurahan yang memiliki penduduk miskin terbesar di Kota Surabaya serta kelurahan yang mendapatkan beras miskin (Raskin) yang terbanyak yaitu sebesar 3.209 Kepala Keluarga (KK) (BPS, 2013).

Sejalan dengan kondisi Kelurahan Wonokusumo yang mendapatkan Raskin terbanyak, maka peneliti ingin melakukan penelitian evaluasi terhadap program Raskin yang dilakukan di Kelurahan Wonokusumo Kecamatan Semampir Surabaya. Evaluasi hasil program Raskin perlu untuk menilai seberapa jauh program Raskin berhasil telah mencapai tujuannya dan sasaran dari program-program pemerintah, tujuan program yaitu untuk mengurangi beban pengeluaran Rumah Tangga Sasaran melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras. Penelitian evaluasi ini juga penting untuk menilai kemajuan dalam mencapai tujuan program Raskin serta dapat menjadi bahan masukan untuk program Raskin yang akan datang. Peneliti ingin mendeskripsikan Program Raskin yang dilaksanakan di Kelurahan Wonokusumo Kecamatan Semampir Surabaya. Dengan menggunakan

indikator evaluasi program dari Pedoman Umum Raskin (2012). Keberhasilan Program Raskin dapat diukur berdasarkan tingkat pencapaian indikator enam Tepat (6T), yaitu Tepat Sasaran, Tepat Jumlah, Tepat Harga, Tepat Waktu, Tepat Administrasi dan Tepat Kualitas. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mengevaluasi secara mendalam tentang tentang program Raskin di Kelurahan Wonokusumo Kecamatan Semampir Surabaya dengan judul: **“Evaluasi Program Beras Miskin (Raskin) di Kelurahan Wonokusumo Kecamatan Semampir Kota Surabaya”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dalam latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan masalah penelitian yaitu “Bagaimana evaluasi program Beras Miskin (Raskin) di Kelurahan Wonokusumo Kecamatan Semampir Kota Surabaya?”

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan yang ingin dicapai dari penulisan skripsi ini adalah untuk mendeskripsikan Program Beras Miskin (Raskin) di Kelurahan Wonokusumo Kecamatan Semampir Kota Surabaya.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat Teoritis dalam penelitian ini yaitu dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah kepustakaan dan memperkaya perkembangan ilmu Administrasi Negara khususnya tentang kajian yang berhubungan dengan kebijakan publik.

II. KAJIAN PUSTAKA

A. Kebijakan Publik

Kebijakan publik menurut Dye dalam Widodo (2009:12) diartikan sebagai *"whatever governments choose to do or not to do"* atau "kebijakan publik apapun yang pemerintah pilih untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu". Sedangkan menurut Edward III dan sharkansky yang dikutip oleh Islamy dalam Widodo (2009:12) mengatakan bahwa kebijakan publik adalah *"what government say and do, or not to do. It is the goals or purpose of government programs"* atau "apa yang pemerintah katakan dan dilakukan atau tidak dilakukan. Kebijakan merupakan serangkaian tujuan dan sasaran dari program-program pemerintah".

B. Evaluasi Kebijakan

1. Definisi Evaluasi Kebijakan

Menurut Muhadjir dalam Widodo (2009 : 112) evaluasi kebijakan publik merupakan suatu proses untuk menilai seberapa jauh suatu kebijakan publik dapat "membuahkan hasil", yaitu dengan membandingkan antara hasil yang diperoleh dengan tujuan atau target kebijakan publik yang ditentukan. Sedangkan menurut Soetomo (2007:60) evaluasi kebijakan adalah langkah terakhir dari suatu proses kegiatan dari sebuah kebijakan yang telah diputuskan bersama, yang secara fungsional dapat menunjukkan tingkat keberhasilan atau berhasil tidaknya suatu program yang telah ditetapkan dan dilaksanakan.

2. Pendekatan Dalam Evaluasi Kebijakan

Dalam melakukan evaluasi kebijakan, selain menentukan tipe evaluasi, tetapi juga harus menentukan

pendekatan-pendekatan apa yang akan digunakan dalam melakukan evaluasi. Menurut Dunn (2003 : 613) Pendekatan-pendekatan dalam evaluasi tersebut adalah sebagai berikut :

a. Evaluasi Semu

Evaluasi semu (*Pseudo Evaluation*) adalah pendekatan yang menggunakan metode-metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai hasil kebijakan, tanpa berusaha untuk menanyakan tentang manfaat atau nilai dari hasil-hasil tersebut terhadap individu, kelompok, atau masyarakat secara keseluruhan.

b. Evaluasi Formal

Evaluasi Formal (*Formal Evaluation*) merupakan pendekatan yang menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang valid dan cepat dipercaya mengenai hasil-hasil kebijakan tetapi mengevaluasi hasil tersebut atas dasar tujuan program kebijakan yang telah diumumkan secara formal oleh pembuat kebijakan dan administrator program.

c. Evaluasi Keputusan Teoritis

Evaluasi Keputusan Teoritis (*Decision-Theoritic Evaluation*) adalah pendekatan yang menggunakan metode-metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan dan valid mengenai hasil-hasil kebijakan yang secara eksplisit dinilai oleh berbagai macam pelaku kebijakan.

3. Tipe Evaluasi Kebijakan

Sebelum melakukan evaluasi program, seorang peneliti harus menentukan tipe evaluasi apa yang akan dipilih dalam mengevaluasi program tersebut. Terkait dengan

evaluasi Widodo (2009 :112) membagi evaluasi menjadi dua tipe yaitu:

a. Evaluasi Hasil (*Outcomes of public policy implementation*)

Evaluasi hasil merupakan riset yang mendasarkan diri pada tujuan kebijakan. Ukuran keberhasilan pelaksanaan kebijakan adalah sejauh mana apa yang menjadi tujuan program dapat dicapai.

b. Evaluasi proses (*Process of public policy implementation*)

Evaluasi proses merupakan riset evaluasi yang mendasarkan diri pada petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis). Ukuran keberhasilan pelaksanaan suatu kebijakan adalah kesesuaian proses implementasi suatu kebijakan dengan garis petunjuk (guide lines) yang telah diterapkan. Untuk menilai keberhasilan suatu kebijakan diperlukan kriteria-kriteria yang dapat digunakan sebagai saran dalam pemecahan masalah kebijakan.

4. Kriteria Evaluasi Kebijakan

Menurut Dunn (2003 :429) merumuskan 6 (enam) kriteria dalam evaluasi adalah sebagai berikut:

a. Efektifitas

Efektifitas berkenaan dengan apakah suatu kebijakan yang dilaksanakan mencapai hasil yang diharapkan.

b. Efisiensi

Efisiensi berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat usaha tertentu. Efisiensi yang sinonim dengan rasionalitas ekonomi merupakan hubungan antara efektivitas dan usaha yang umumnya diukur dengan biaya moneter. Kebijakan yang mencapai efektivitas tertinggi dengan biaya terkecil dinamakan efisien.

c. Kecukupan

Kecukupan berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektifitas memuaskan kebutuhan, nilai atau kesempatan yang menumbuhkan masalah. Kriteria ini menekankan kuatnya hubungan antara alternatif kebijakan dan hasil yang dicapai.

d. Kesamaan

Kesamaan berkaitan erat dengan rasionalitas legal dan sosial, dan menunjuk pada distribusi akibat dan usaha antara kelompok yang berbeda dalam masyarakat. Suatu program tertentu mungkin efektif, efisien dan mencukupi, namun mungkin ditolak karena menghasilkan distribusi biaya dan manfaat yang tidak merata.

e. Responsivitas

Responsivitas berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi atau nilai kelompok masyarakat tertentu. Kriteria ini penting karena analisis yang dapat memuaskan semua kriteria lainnya efektifitas, efisiensi, kecukupan, kesamaan masih gagal jika belum menanggapi kebutuhan aktual dari kelompok yang semestinya diuntungkan dari adanya suatu kebijakan.

f. Ketepatan

Ketepatan berhubungan erat dengan rasionalitas substansif, karena pertanyaan ketepatan kebijakan tidak berkenaan dengan satu kriteria individu, tetapi dua atau lebih kriteria secara bersama-sama. Kriteria ketepatan mempertanyakan apakah tujuan tersebut tepat untuk suatu masyarakat.

Penelitian ini menggunakan kriteria ketepatan seperti yang dikemukakan oleh Dunn (2003:610) dan telah mencakup dalam indikator 6T

(Enam Tepat) yang terdapat di Pedoman Umum Raskin (2012). Program Raskin (beras untuk keluarga miskin) yang akan dilakukan di Kelurahan Wonokusumo Kecamatan Semampir Surabaya, penelitian ini menggunakan tipe evaluasi hasil (*outcomes of public policy implementation*) yang telah dikemukakan oleh Widodo. Berikut ini akan dijelaskan indikator Raskin.

C. Indikator Raskin

Untuk menilai keberhasilan suatu program diperlukan indikator yang dapat membantu dalam memecahkan masalah. Indikator program Raskin ditunjukkan dengan tercapainya target 6 Tepat, yaitu :

a. Tepat Sasaran

Raskin hanya diberikan kepada RTSM-PM (Rumah Tangga Sasaran – Penerima Manfaat).

b. Tepat Jumlah

Jumlah beras Raskin yang merupakan hak RTS-PM (Rumah Tangga Sasaran – Penerima Manfaat) sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu 15 kg/RTS/bulan atau 180 kg/RTS/tahun.

c. Tepat Harga

Harga tebus Raskin adalah sebesar Rp. 1.600,00/kg netto di TD (Titik Distribusi).

d. Tepat Waktu

Waktu pelaksanaan penyaluran beras kepada RTS-PM (Rumah Tangga Sasaran-Penerima Manfaat) sesuai dengan rencana penyaluran.

e. Tepat Administrasi

Terpenuhinya persyaratan administrasi secara benar, lengkap dan tepat waktu.

f. Tepat Kualitas

Terpenuhinya persyaratan kualitas beras sesuai dengan kualitas beras Bulog.

D. Rekomendasi Kebijakan

Menurut Dunn (1994 : 267) rekomendasi merupakan bagian dari aktivitas dalam evaluasi kebijakan. Rekomendasi merupakan informasi tentang kemungkinan kegiatan dimasa mendatang yang akan menghasilkan konsekuensi bagi seorang individu, kelompok, atau masyarakat secara keseluruhan. Sedangkan menurut Weiss dalam Widodo (2009 : 115) menjelaskan beberapa alternatif rekomendasi yang bisa digunakan untuk membuat sebuah rekomendasi diantaranya:

1. Kebijakan perlu diteruskan atau dihentikan.
2. Kebijakan perlu dirumuskan, namun juga perlu diperbaiki baik dalam prosedur maupun penerapannya.
3. Perlunya menambah atau mengembangkan strategi dan teknik program-program khusus.
4. Perlunya menerapkan kebijakan program serupa di tempat lain.
5. Perlunya mengalokasikan sumber daya langka di antara program yang saling kompetitif.
6. Perlunya menolak atau menerima teori atau pendekatan kebijakan program.

III. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Menurut Nawawi (2003:63) penelitian deskriptif merupakan metode yang menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek atau objek yang

sedang diamati berdasarkan fakta-fakta yang ada atau sebagaimana adanya yang dinyatakan dengan kata-kata atau simbol. Penelitian kuantitatif deskriptif digunakan dalam penelitian ini karena penelitian ini bertujuan untuk mengetahui permasalahan yang terjadi serta mendapatkan informasi berupa pernyataan dan data yang dikumpulkan dalam bentuk angka yang kemudian akan dideskripsikan dalam bentuk kata-kata atau kalimat. Penelitian ini akan mendeskripsikan pencapaian tujuan program Raskin ditinjau dari indikator 6 T (Enam Tepat) Raskin di Kelurahan Wonokusumo Kecamatan Semampir Kota Surabaya.

Lokasi penelitian merupakan tempat yang digunakan untuk melakukan penelitian. Lokasi penelitian ini dilakukan di Kelurahan Wonokusumo Kecamatan Semampir Kota Surabaya. Alasan memilih lokasi ini sebagai tempat penelitian karena Kelurahan Wonokusumo merupakan salah satu kelurahan yang berada di Kota Surabaya yang juga melaksanakan program Raskin hingga saat ini serta memiliki masalah dengan jumlah penduduk miskin terbanyak di Kota Surabaya.

Sumber data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah berasal dari sumber data primer dan data sekunder. Dalam penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data yang terdiri dari data primer dan data sekunder, yaitu sebagai berikut: Data primer adalah data primer adalah data yang hanya dapat diperoleh dari sumber aslinya melalui narasumber yang tepat dan yang dijadikan responden dalam penelitian (Sarwoto, 2006:124). Data sekunder yaitu data

data yang sudah tersedia, sehingga peneliti tinggal mencari dan mengumpulkan saja (Sarwoto, 2006:123).

Teknik pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai setting, berbagai sumber, dan berbagai cara (Sugiyono, 2009:137). Dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan penyebaran angket (kuesioner), wawancara dan observasi.

Populasi dan sampel digunakan dalam penelitian ini. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2009:90). Dari pengertian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa populasi adalah sekelompok masyarakat penerima Raskin yang berada di wilayah Kelurahan Wonokusumo Kecamatan Semampir Kota Surabaya dengan jumlah populasinya sebanyak 3.209 KK. Menurut Sugiyono (2009:81) sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Adapun sampel dalam penelitian ini adalah masyarakat yang berada di wilayah Kelurahan Wonokusumo Kecamatan Semampir Kota Surabaya sebanyak 100 responden.

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik *sampling insidental*. Teknik *sampling insidental* merupakan teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan/incidental bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai

sumber data (Sugoyono, 2009:85). Pengambilan sampel dalam penelitian ini ditentukan dengan menggunakan rumus Slovin yaitu sebagai berikut :

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Keterangan:

n = ukuran sampel

N = ukuran populasi yang berjumlah 3.209 RTM

e = persentase kelonggaran ketidakpastian karena kesalahan pengambilan sample yang masih dapat ditolerir yaitu 10 %.

Berdasarkan rumus di atas maka diperoleh perhitungan sebagai berikut:

$$n = \frac{3.209}{1 + 3.209 (0,1^2)} = \frac{3.209}{32,10} = 99,9$$

= 100 responden

100 responden diambil secara insidental dari 3.209 Rumah Tangga Miskin (RTM) dari 16 RW di Kelurahan Wonokusumo.

Definisi operasional variabel berisikan tentang indikator-indikator dari suatu variabel yang memungkinkan peneliti dalam mengumpulkan data yang relevan. Dalam penelitian ini definisi operasional dari variabel yang diteliti sebagai berikut: Tepat Sasaran indikatornya masyarakat yang menyatakan RTM dan memiliki kartu Raskin, Tepat Jumlah indikatornya 15 kg/RTM/Bulan, Tepat Harga indikatornya Rp 1.600/kg/RTM, Tepat Waktu indikatornya masyarakat menerima Raskin rutin tiap bulannya, Tepat Administrasi indikatornya dalam pengambilan Raskin menggunakan Kartu Raskin yang dikeluarkan oleh Bapemas dan Tepat Kualitas indikatornya Raskin telah layak konsumsi.

Teknik analisis data Berdasarkan tujuan penelitian yaitu untuk mendeskripsikan capaian indikator enam tepat dalam program Raskin yang dilaksanakan di Kelurahan Wonokusumo Kecamatan Semampir Kota Surabaya, maka analisis dalam yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif kuantitatif. Dalam penelitian kuantitatif, analisis data merupakan kegiatan setelah data dari seluruh responden atau sumber data lain terkumpul. Kegiatan dalam analisis data adalah mengelompokkan data berdasarkan variabel dan jenis responden, mentabulasi data berdasarkan variabel dari seluruh responden, menyajikan data tiap variabel yang diteliti, melakukan perhitungan untuk menjawab rumusan masalah. Termasuk dalam statistik deskriptif antara lain adalah penyajian data melalui tabel, grafik diagram, perhitungan penyebaran data melalui perhitungan rata-rata dan perhitungan prosentase (Sugiyono, 2009:147).

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada Pedum Raskin 2012 pangan adalah salah satu hak azasi manusia dan sebagai komoditi strategis yang dilindungi oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan kesepakatan internasional, yaitu *Universal Declaration of Human Right* (1948), *Rome Declaration on World Food Security and World Food Summit* 1996, *Millenium Goals* (MDGS). Bahkan dalam kesepakatan MDGS dunia internasional telah menargetkan pada tahun 2015 setiap negara termasuk Indonesia telah sepakat menurunkan kemiskinan dan kelaparan sampai separuhnya. Salah satu program

pemerintah untuk menjamin kecukupan pangan khususnya untuk masyarakat miskin adalah program beras untuk orang miskin atau yang lebih dikenal dengan program Raskin. Tujuan dari program Raskin adalah untuk mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin dalam memenuhi kebutuhan pangan pokok yaitu beras.

Indikator Raskin

1. Tepat Sasaran

Salah satu parameter evaluasi program Raskin adalah ketepatan dalam hal sasaran. Sasaran program Raskin ditujukan kepada kelompok masyarakat RTM (Rumah Tangga Miskin). Dalam hal ketepatan sasaran program Raskin yang dilaksanakan di Kelurahan Wonokusumo. Berikut ini merupakan tabel tepat sasaran:

Tabel 1. Ditinjau Dari Sasaran Penerima Raskin

Keterangan	Ya		Tidak	
	Jumlah	%	Jumlah	%
Status RTM	100	100%	0	0%
Memiliki Kartu Raskin	56	56%	44	44%

Sumber : Data diolah, 2013

Dari tabel diatas menunjukkan dari 100 responden yang menyatakan sebagai penerima manfaat Raskin semua responden atau 100% menyatakan berstatus sebagai Rumah Tangga Miskin (RTM). Sedangkan jika ditinjau dari kepemilikan kartu Raskin terdapat 56 responden atau 56% responden yang menyatakan memiliki kartu Raskin dan 44 responden atau

44% responden menyatakan tidak memiliki kartu Raskin.

Peneliti menemukan dilangan pada saat survey langsung ke masyarakat yang menyatakan sebagai penerima manfaat Raskin, terdapat seorang ibu yang menggunakan perhiasan emas berupa cincin, gelang dan kalung yang juga menyatakan bahwa mendapatkan jatah Raskin. Sedangkan pernyataan dari masyarakat miskin yang dulunya dapat beras Raskin 15 kg/Bulan, kini tidak lagi. Hal ini diperkuat oleh bapak ketua RW setempat bahwa pembagian Raskin diwilayah tersebut dibagi rata dan sudah menjadi keputusan bersama oleh masyarakat penerima Raskin yang terdaftar di DPM-2, ketua RW, RT dan Kepala Kelurahan setelah diadakannya musyawarah.

2. Tepat Jumlah

Peraturan yang telah ditetapkan dalam Pedoman Umum Raskin 2012, setiap RTM berhak menerima beras 15 kg per bulannya. Temuan peneliti di lapangan, jatah RTM dalam menerima beras tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam Pedoman Umum Raskin. Berikut ini merupakan tabel tepat jumlah :

Tabel 2. Jumlah Beras Yang Diterima

Keterangan	Ya		Tidak	
	Jumlah	%	Jumlah	%
Menerima 15 kg/Bulan	17	17%	83	83%

Sumber : Data diolah, 2013

Dari tabel 2 menunjukkan bahwa dari 100 responden hanya terdapat 17 responden atau 17%

responden yang menyatakan mendapatkan beras Raskin sebanyak 15kg/Bulannya. Sedangkan 83 responden atau 83% responden menyatakan tidak menerima beras 15 kg/Bulan.

Hal ini terjadi dikarenakan adanya pembagian rata sehingga tiap RTM tidak mendapatkan Raskin sebanyak 15 kg/Bulan melainkan dengan berat yang bervariasi yaitu 3 kg/Bulan sampai 7,5 kg/Bulannya.

3. Tepat Harga

Dalam Pedoman Umum Raskin 2012 harga beras yang telah ditentukan adalah seharga Rp 1.600/kg yang harus dibayar oleh Rumah Tangga Sasaran-Penerima Manfaat (RTS-PM). Jadi setiap RTS-PM berhak membayar 24.000/15kg tiap bulanya. Berikut ini hasil terkait dengan ketepatan harga :

Tabel 3. Harga Raskin Yang Harus Dibayar Penerima Raskin

Keterangan	Ya		Tidak	
	Jumlah	%	Jumlah	%
Membayar Rp 1.600/kg	18	18%	82	82%

Sumber : Data diolah, 2013

Dari tabel 3 diatas menunjukkan bahwa hasil penelitian dari 100 responden yang tercatat sebagai penerima Raskin terdapat 18 responden atau 18% responden yang menyatakan membayar beras seharga Rp 1.600/kg. Sedangkan sebanyak 82 responden atau 82% responden yang menyatakan tidak membayar harga beras seharga Rp 1.600 per kilonya, melainkan dengan harga yang bervariasi mulai dari harga 1.600 hingga Rp 3.600, yang mayoritasnya

responden menjawab bahwa harga beras yang harus dibayar adalah rata-rata seharga 2.000/kg nya.

Hal ini terjadi, harga yang seharusnya Rp 1.600/kg, tetapi mayoritas di RT atau RW setempat memberi harga tebus Rp 2.000/kg dikarenakan uang lebih yang dibayarkan dari harga tersebut digunakan untuk membayar biaya operasional dalam pelaksanaan Raskin yaitu transportasi becak untuk mengangkut beras dari Kelurahan sampai RT atau RW setempat dan juga kresek yang digunakan untuk pembagian rata kepada semua masyarakat yang berada di wilayah tersebut.

4. Tepat Waktu

Dalam kriteria waktu pelaksanaan distribusi beras kepada RTS-PM adalah sesuai dengan rencana Distribusi Raskin, yaitu menerima Raskin sebanyak 12 kali dalam setahun. Berikut ini merupakan tabel terkait ketepatan waktu dalam pelaksanaan program Raskin di Kelurahan Wonokusumo Kota Surabaya:

Tabel 4. Ketepatan Waktu

Keterangan	Ya		Tidak	
	Jumlah	%	Jumlah	%
Menerima 12 kali dalam 1 tahun	71	71%	29	29%

Sumber : Data diolah, 2013

Hasil dari 100 responden yang menyatakan sebagai penerima Raskin, terdapat 71 responden atau 71% responden yang menyatakan bahwa tiap bulan menerima beras sedangkan terdapat 29 responden atau 29% responden yang menyatakan bahwa

tidak rutin mendapatkan Raskin tiap bulannya, dikarenakan adanya pembagian rata untuk seluruh masyarakat yang akibatnya dari seluruh jumlah masyarakat yang terdapat diwilayah tersebut tidak menerima beras setiap bulannya.

5. Tepat Administrasi

Tepat administrasi yaitu terpenuhinya persyaratan administrasi secara benar, lengkap dan tepat waktu. Dalam pengambilan beras Raskin masyarakat miskin harus menunjukkan kartu Raskin yang sah dikeluarkan oleh Bapemas dan pembayaran beras Raskin dilakukan ditempat TB (Titik Bagi) yang menjadi tempat pembagian Raskin berlangsung, setelah semuanya telah memenuhi syarat maka beras Raskin pun akan di berikan kepada masyarakat miskin yang terdata di DPM-2 tersebut. Berikut ini merupakan tabel tepat administrasi:

Tabel 5. Ketepatan Administrasi

Keterangan	Ya		Tidak	
	Jumlah	%	Jumlah	%
Menunjukkan Kartu Raskin	52	52%	48	48%

Sumber : Data diolah, 2013

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa terdapat 52 responden atau 52% responden yang menyatakan bahwa dalam pengambilan beras Raskin menggunakan Kartu Raskin. Sedangkan terdapat 48 responden atau 48% responden yang menyatakan tidak menggunakan Kartu Raskin dalam pengambilan beras Raskin.

Peneliti menemukan dilapangan bahwa dalam pembagian Raskin di

Kelurahan Wonokusumo menggunakan kartu atau kupon yang telah dibuat oleh RW atau RT setempat. Alasan pembuatan kupon tersebut agar warga yang berada diwilayah RT atau RW tersebut yang mendapatkan beras Raskin tidak *double*.

6. Tepat Kualitas

Kualitas beras Raskin berdasarkan Pedoman Umum Raskin adalah beras berkualitas medium kondisi baik dan tidak berhama, sesuai dengan standar kualitas pembelian pemerintah yang diatur dalam perundang-undangan (Pedum Raskin, 2012). Berikut ini merupakan tabel tepat kualitas :

Tabel 6. Tepat Kualitas

Keterangan	Ya		Tidak	
	Jumlah	%	Jumlah	%
Raskin layak konsumsi	64	64%	36	36%

Sumber : Data diolah, 2013

Hasil Tabel 4.15 menunjukkan dari 100 responden terdapat 64 responden atau 64% responden yang menyatakan bahwa beras Raskin telah layak konsumsi sedangkan terdapat 36 responden atau 36% responden yang menyatakan bahwa beras tidak layak konsumsi. Dalam penelitian di Kelurahan Wonokusumo, kualitas beras yang didapatkan oleh RTM bervariasi, sebagian besar masyarakat menyatakan bahwa beras yang diterima telah cukup baik, namun terkadang juga buruk.

Setelah diketahui hasil dari indikator 6 Tepat, maka selanjutnya yang harus dilakukan oleh pihak yang terkait dengan program Raskin yaitu

melakukan rekomendasi. Dengan melakukan rekomendasi maka akan diketahui apakah kebijakan program Raskin perlu diteruskan atau dihentikan dan apakah perlu untuk dirumuskan kembali terkait dengan perbaikan prosedur maupun penerapannya.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di Kelurahan Wonokusumo Surabaya, maka dapat ditarik kesimpulan :

1. Tepat Sasaran

Dari segi sasaran, program Raskin di Kelurahan Wonokusumo dapat dikatakan belum tepat sasaran sepenuhnya. Peneliti mendapatkan adanya masyarakat yang seharusnya tidak mendapatkan jatah Raskin justru mendapatkan jatah Raskin. Hal ini terjadi karena atas kesepakatan warga beras dibagi rata untuk semua warga yang berada di wilayah tersebut. Walaupun dari 100% responden menyatakan sebagai RTM.

2. Tepat Jumlah

Dari segi jumlah, program Raskin yang dilaksanakan di Kelurahan Wonokusumo dapat dikatakan belum tepat jumlah. Jumlah Raskin yang harus diterima oleh RTM yaitu sebanyak 15 kg / bulannya. Hasil penelitian yang ditemukan dari 100 responden yang menyatakan menerima Raskin sebanyak 15 kg / bulannya, hanya terdapat 17% responden. Hal ini menunjukkan bahwa di Kelurahan Wonokusumo Surabaya dapat dikatakan belum tepat jumlah. Hal tersebut dikarenakan beras Raskin dibagi rata pada semua warga yang

berada di wilayah Kelurahan Wonokusumo.

3. Tepat Harga

Dari segi harga belum memenuhi ketepatan harga yaitu 1.600/kg. Harga beras Raskin per kilonya bervariasi antara Rp 1.600 sampai Rp 3.600. Terdapat 18% responden menyatakan tidak menebus harga beras Rp 1.600/kg. Kenaikan harga tersebut disebabkan untuk membayar biaya operasional.

4. Tepat Waktu

Dari segi waktu, program Raskin di Kelurahan Wonokusumo belum sepenuhnya memenuhi ketepatan waktu. Hasil dari 100 responden terdapat 28% responden yang menyatakan tidak mendapatkan beras Raskin dua belas kali dalam satu tahun. Peneliti menemukan dilapangan bahwa banyak juga masyarakat yang tidak dapat secara rutin setiap bulannya dengan adanya pembagian rata di wilayah Kelurahan Wonokusumo dan beras yang didistribusikan kadang-kadang mundur.

5. Tepat Administrasi

Dari segi administrasi, program Raskin yang dilaksanakan di Kelurahan Wonokusumo dapat dikatakan belum tepat administrasi. Responden yang menyatakan menunjukkan kartu Raskin dalam pengambilan beras Raskin yaitu sebanyak 52 responden atau 52%. Peneliti menemukan dilapangan bahwa dalam pengambilan beras tidak hanya menggunakan kartu Raskin yang dikeluarkan oleh Bapemas melainkan berupa kupon yang telah dibuat oleh RT atau RW setempat.

6. Tepat Kualitas

Kualitas beras Raskin berdasarkan Pedum 2012 adalah beras berkualitas medium kondisi baik dan tidak berhama, sesuai dengan standar kualitas pembelian pemerintah yang diatur dalam perundang-undangan. Responden yang menyatakan penerima manfaat Raskin terdapat 63% responden yang menyatakan bahwa beras yang diterima baik atau layak konsumsi. Tetapi tidak sedikit juga masyarakat yang menyatakan beras yang diterima tiap bulannya tidak sama, dalam artian beras yang diterima kadang baik tapi terkadang juga jelek atau tidak layak konsumsi.

B. Saran

Dengan melihat fakta-fakta yang ada dilapangan mengenai evaluasi program Raskin di Kelurahan Wonokusumo Kota Surabaya, maka dapat direkomendasikan program Raskin ke depan harus mengacu pada indikator Raskin 6 Tepat, yaitu :

1. Tepat Sasaran

Sebaiknya Kepala RT dan RW membagikan Raskin kepada RTS-PM (Rumah Tangga Sasaran-Penerima Manfaat) yang benar-benar tercatat dalam DPM-2.

2. Tepat Jumlah

Jumlah Raskin yang diterima pada Rumah Tangga Sasaran (RTS) harus sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, yaitu 15 kg per bulannya dan RTM rutin menerima dalam 12 Bulan (satu tahun).

3. Tepat Harga

Pemerintah sebaiknya mengalokasikan dana khusus untuk implementor yang dapat digunakan

untuk biaya transportasi pendistribusian Raskin.

4. Tepat Waktu

Dalam pelaksanaan distribusi beras Raskin sebaiknya dilaksanakan rutin setiap bulan sesuai dengan Pedoman Umum Raskin dan para implementor menghindari terjadinya keterlambatan pendistribusian Raskin.

5. Tepat Administrasi

Dalam pelaksanaannya Bapemas sebagai yang bertanggung jawab dalam hal kartu Raskin, harus lebih transparan dalam memberikan kartu dan bisa bekerja sama oleh RT atau RW setempat agar yang mendapatkan kartu Raskin bisa lebih tepat sasaran.

6. Tepat Kualitas

Bulog sebagai penanggung jawab dalam program Raskin perlu mengupayakan penyediaan beras yang terjamin kualitasnya.

Daftar Pustaka

Dunn, William. 1994. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta : PT. Hanindita Graha.

_____. 2003. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Gajah Mada University Press.

Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia. 2012. *Pedoman Umum Penyaluran Raskin*.

Nawawi, Hadari. 2003. *Metode Penelitian Bidang Sosial*.

Yogyakarta: PT. Gajahmada
University Press.

Sarwoto, Jonathan. 2006. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung : Alfabeta.

Suharto, Edi. 2010. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*. Bandung: Refika Aditama.

Soetomo. 2007. *Teori-Teori Sosial dan Kebijakan Publik*. Jakarta: Prenada.

Widodo, Joko. 2009. *Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Malang: Bayu Media.

Referensi Internet

(www.bulog.go.id diakses, 10 Pebruari 2013)

(www.statistikindonesia.com diakses 13 Maret 2013)

(www.dispendukcapil.surabaya.go.id diakses 13 Maret 2013)